

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Hasil Penelitian

Pada tahapan awal peneliti menyebarkan pertanyaan melalui keuseioner dengan menggunakan 10 sampel atau responden yang membantu menjawab pertanyaan, dengan menggunakan teknik populasi dan sampling pada divisi internal audit & System yang ada diperusahaan dan dengan menyebarkan 10 pertanyaan mengenai penerapan dan kebutuhan pedoman sistem baru dari perusahaan.

5.1.1. Gambaran Umum responden

1. Data Responden Berdasarkan Jenis Klamin

Tabel 5. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Laki-laki	6	60%
Perempuan	4	40%
Total	10	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan tabel 5.1. diatas memebrikan gambaran bahwa sampel yang menjawab pertanyaan di dominasi oleh laki-laki yaitu sebantak 60% dan perempuan hanya 40%.

2. Data Responden Berdasarkan Usia

Tabel 5. 2 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase
21-30	3	30%
31-40	3	30%
42-50	4	40%
>50	0	0%
Total	10	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan tabel 5.2. memberikan gambaran bahwa responden yang menjadi pekerja di divisi internal Audit & system yang 21-30 tahun sebanyak 3 orang sebesar 30%, usia 31-40 tahun sebanyak 3 orang sebesar 30%, usia 41-50 tahun sebanyak 4 orang sebesar 40%, tidak ada pekerja yang usianya lebih dari 50 tahun.

3. Data Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Tabel 5. 3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase
Starta 1 (S1)	8	80%
Starata 2 (S2)	2	20%
Total	10	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang menjadi responden dengan berpendidikan terakhir s1 sebanyak 8 orang sebesar 80%, dan S2 sebanyak 2 orang sebesar 20%

4. Data Responden Berdasarkan Jabatan di perusahaan

Tabel 5. 4 Data Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Presentase
VP	1	10%
AVP	4	40%
Staff	5	50%
Total	10	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan tabel 5.4. dapat dilihat bahwa divisi internal audit & system terdapat 1 VP (*Vice President*) yaitu 1 %, lalu 4 AVP (*Asisstant Vice President*) atau 4% dan 5 responden memiliki jabatan staff atau sebanyak 50%.

5.2. Analisis Kualitatif

Hasil dari analisis kualitatif disajikan secara deskriptif dari hasil jawaban responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini dimana frekuensi dari hasil pernyataan menentukan langkah selanjutnya apakah perusahaan membutuhkan rancangan pedoman baru atau tidak yang nantinya akan di terapkan.

Tabel 5. 5 Distribusi Frekuensi pertanyaan

No.	Pernyataan	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Perusahaan telah memiliki sertifikat SMM dan SMAP	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	0	0%
		4 Setuju	7	70%
		5 Sangat Setuju	3	30%
2	Perusahaan melaksanakan pekerjaan berdasarkan pada klausul ISO 9001: 2015 dan ISO 37001: 2016	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	0	0%
		4 Setuju	7	70%
		5 Sangat Setuju	3	30%
3	Perusahaan memastikan ruang lingkup sistem manajemen mempertimbangkan isue internal dan eksternal serta harapan kebutuhan pihak terkait	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	1	10%
		3 Rata Rata (Netral)	4	40%
		4 Setuju	2	20%
		5 Sangat Setuju	3	30%
4	Perusaan telah menerapkan pedoman, prosedur dan instruksi kerja sistem manajemen mutu	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	2	20%
		4 Setuju	6	60%
		5 Sangat Setuju	2	20%

No.	Pernyataan	Keterangan	Frekuensi	Persentase
5	Perusahaan telah menerapkan pedoman, prosedur dan instruksi kerja sistem manajemen anti penyusunan	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	0	0%
		4 Setuju	6	60%
		5 Sangat Setuju	4	40%
6	Pedoman sistem manajemen mutu dan pedoman sistem manajemen anti penyiapan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	2	20%
		4 Setuju	7	70%
		5 Sangat Setuju	1	10%
7	Acuan kerja sistem manajemen masih berjalan secara parsial atau masing-masing	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	4	40%
		4 Setuju	5	30%
		5 Sangat Setuju	1	10%
8	Penerapan Pedoman SMM dan SMAP dilaksanakan secara efektif	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	7	70%
		4 Setuju	2	20%
		5 Sangat Setuju	1	10%
9	Penerapan pedoman SMM dan SMAP dilaksanakan secara efisien	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	7	70%

		4 Setuju	2	20%
		5 Sangat Setuju	1	10%
10	Perlu adanya pedoman sistem manajemen yang membuat dokumen-dokumen terintegrasi	1 Sangat Tidak Setuju	0	0%
		2 Tidak Setuju	0	0%
		3 Rata Rata (Netral)	0	0%
		4 Setuju	7	70%
		5 Sangat Setuju	3	30%

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 5.5. diatas dapat dikatakan bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 1 ditemukan 7 responden (70%) menjawab setuju dan 3 responden (30%) menjawab sangat setuju, dengan hasil jawaban tersebut dapat dinyatakan bahwa perusahaan memang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau ISO 9001: 2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau ISO 37001:2016.

Berdasarkan Tabel 5.5. pernyataan mengenai perusahaan melaksanakan pekerjaan berdasarkan pada klausul ISO 9001: 2015 dan ISO 37001: 2016 memberikan jawaban yang di dominasi oleh setuju karena 7 responden (70%) menjawab setuju dan 3 responden (30%) menjawab sangat setuju dengan pernyataan bahwa perusahaan melaksanakan pekerjaan berdasarkan pada klausul ISO 9001: 2015 dan ISO 37001: 2016.

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 3 dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden mengenai Perusahaan memastikan ruang lingkup sistem manajemen mempertimbangkan isue

internal dan eksternal serta harapan kebutuhan pihak terkait ditemukan 1 responden (10%) menjawab tidak setuju, 4 responden (40%) menjawab netral (ragu-ragu), 2 responden (20%) menjawab setuju, dan 3 responden (30%) menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup sistem manajemen masih perlu mempertimbangkan ruang lingkungannya.

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 4 mengenai dokumen acuan dapat diketahui bahwa 2 responden (20%) menjawab netral (ragu-ragu), 6 responden (60%) menjawab setuju dan 2 responden (20%) menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju dengan penerapan acuan kerja di perusahaan.

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 5 dapat diketahui bahwa 6 responden (60%) menjawab setuju dan 4 responden (40%) menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan pedoman, prosedur dan instruksi kerja sistem manajemen anti penyuapan.

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 6 menunjukkan 2 responden (20%) menjawab netral (ragu-ragu), 7 responden (70%) menjawab setuju dan 1 responden (10%) menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa responden setuju mengenai pedoman sistem manajemen mutu dan pedoman sistem manajemen anti penyiapan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan meskipun ada beberapa yang masih ragu.

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 7 dapat diketahui bahwa 4 responden (40%) menjawab netral (ragu-ragu), 5 responden (50%) menjawab setuju dan 1 (10%) responden menjawab

sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa memang penerapan sistem manajemen masih berjalan parsial sehingga menyebabkan dokumen dan penerapan acuannya kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 8 mengenai pernyataan Penerapan Pedoman SMM dan SMAP dilaksanakan secara efektif terdapat 7 responden (70%) menjawab netral (ragu-ragu), 2 responden (20%) menjawab setuju dan 1 responden (1%) menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja di perusahaan masih ragu akan ke efektifan dari penerapan pedoman SMM dan SMAP yang digunakan saat ini. Begitu juga dengan pernyataan nomor 9 mengenai penerapan pedoman yang efisien ditemukan jawaban dari 7 responden (70%) menjawab netral (ragu-ragu), 2 responden (20%) menjawab setuju dan 1 responden (1%) menjawab sangat setuju,

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden pada pernyataan nomor 10 dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden tentang kebutuhan adanya pedoman baru yang sudah mengintegrasikan SMM dan SMAP ditemukan 7 responden (70%) menjawab setuju dan 3 responden (30%) menjawab sangat setuju, hal ini menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju untuk perancangan pedoman baru di perusahaan.

5.3. Hasil Analisis

Pada tahapan selanjutnya setelah mendapatkan jawaban dari responden, peneliti memutuskan untuk membantu merancang pedoman sistem manajemen yang mengintegrasikan ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dengan metode ini membantu perusahaan untuk

melakukan perbandingan proses bisnis yang telah ada melalui pedoman-pedoman yang telah diterapkan sebelumnya, dibantu dengan diskusi melalui wawancara dan observasi langsung di perusahaan dilakukan melalui kegiatan yang alur prosesnya dapat dilihat pada Gambar 5.1. sebagai berikut:



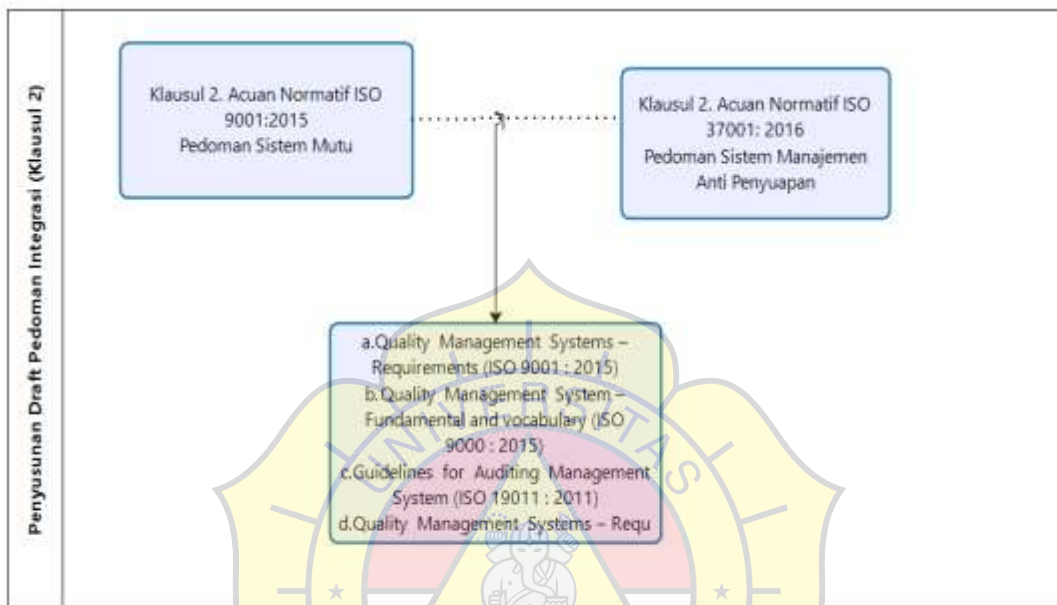
Gambar 5. 1 Alur proses perancangan dengan pendekatan dan analisis deksriptif

1. Mengorganisasikan data guna mengidentifikasi klausul ISO 9001: 2015 dan ISO 37001: 2016.
2. Membandingkan persamaan dan perbedaan antara klausul ISO 9001: 2015 dan ISO 37001: 2016.
3. Mengidentifikasi klausul dan poin mana saja yang bisa diintegrasikan dalam pedoman.

Selanjutnya dapat dilihat proses perancangan pedoman sistem manajemen terintegrasi yang membandingkan dari dua dokumen pedoman sebelumnya, penjelan

dilakukan dengan menjelaskan perbandingan klausul yang terdapat pada halaman juga poin-poin klausul seperti berikut ini:

1) Klausul 2. Acuan Normatif



Gambar 5. 2 Alur penyusunan pedoman klausul 2

Pada klausul 2 mengenai Acuan Normatif di Pedoman ISO 9001:2015 (SMM) ada pada halaman 23 Dan pada Pedoman ISO 37001:2016 (SMAP) pada halaman 31 menjadi sebagai berikut :

Pedoman Integrasi ini ini, baik isi, susunan, maupun kosakata mengacu kepada sumber – sumber yaitu :

- a. Quality Management Systems – Requirements (ISO 9001 : 2015)

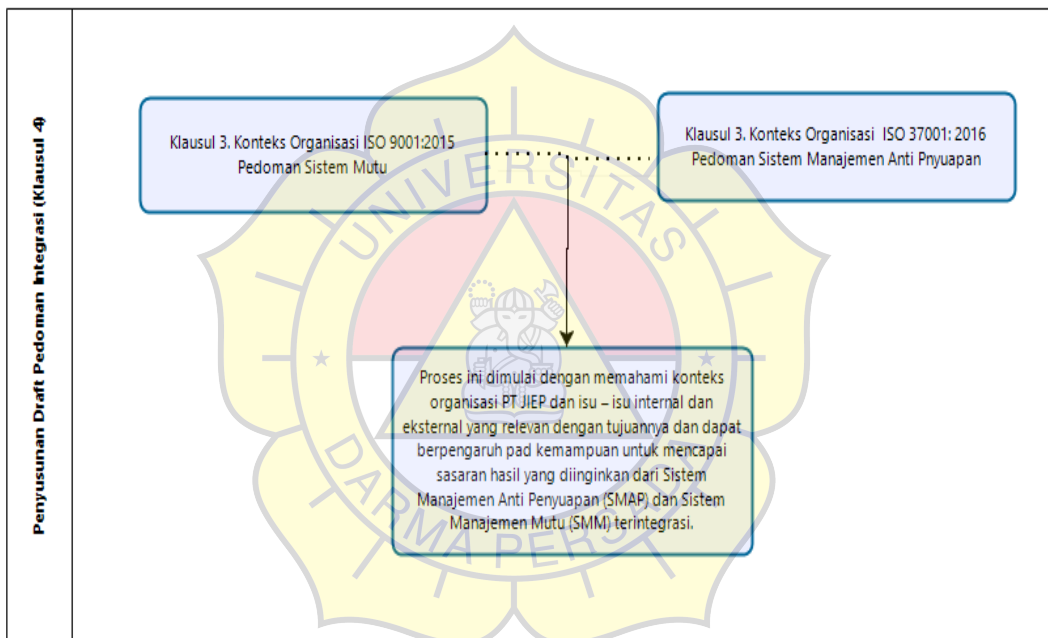
- b. Quality Management System – Fundamental and vocabulary (ISO 9000 : 2015)
- c. Guidelines for Auditing Management System (ISO 19011 : 2011)
- d. Quality Management Systems – Requirements (ISO 9001 : 2015)
- e. Quality Management System – Fundamental and vocabulary (ISO 9000 : 2015)
- f. Guidelines for Auditing Management System (ISO 19011 : 2011)
- g. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
- h. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- j. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- l. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- m. Peraturan Menteri BUMN No.Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance);

- n. Surat edaran Menteri BUMN SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
- o. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta aturan perubahannya;
- q. SNI ISO 31000:2018 Manajemen Risiko;
- r. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- s. Pedoman Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT JIEP;
- t. Pedoman Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT JIEP;
- u. Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) PT JIEP;
- v. Pedoman Gratifikasi PT JIEP;
- w. Pedoman Sistem Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan dan/atau Pelanggaran (Whistleblowing System) PT JIEP; dan
- x. Pedoman Manajemen Risiko PT JIEP.

2) Klausul 3 Istilah, Definisi dan Singkatan

Pada klausul 3 mengenai Istilah, Definisi dan Singkatan di Pedoman ISO 9001:2015 (SMM) ada pada halaman 24 Dan pada Pedoman ISO 37001:2016 (SMAP) pada halaman 33 menjadi penggabungan definisi yang berkaitan dengan kedua ISO tersebut.

3) Klausul 4 Konteks Organisasi



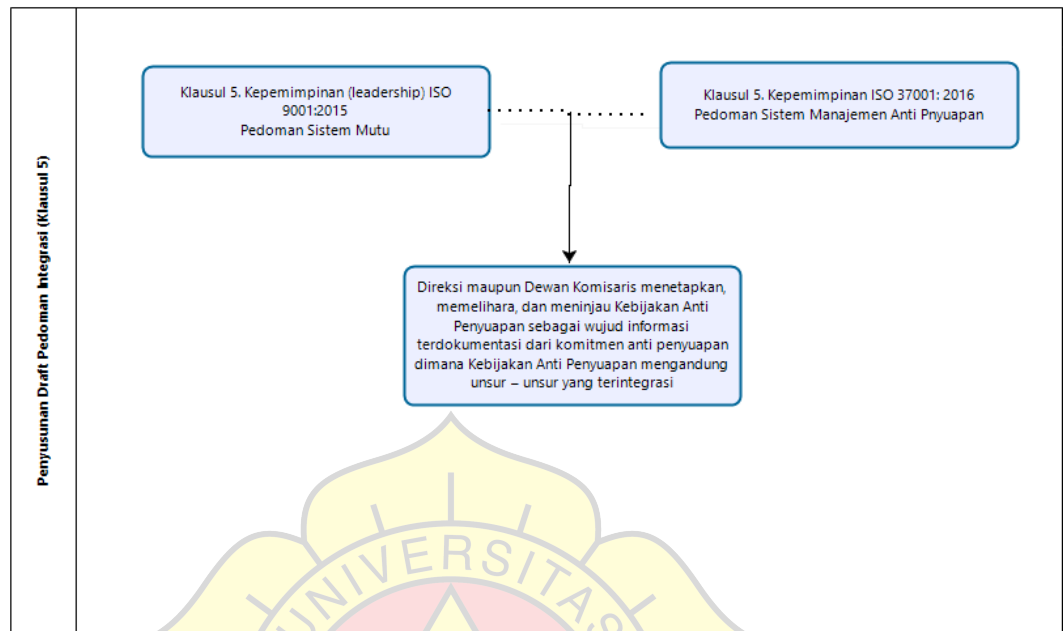
Gambar 5. 3 Alur penyusunan pedoman klausul 4

Pada klausul 4 mengenai Konteks Organisasi di Pedoman ISO 9001:2015 (SMM) ada pada halaman 17, 22,29 dan 30 lalu pada Pedoman ISO 37001:2016 (SMAP) pada halaman 16, 26. 40 dan 41 menjadi terintegrasi seperti berikut ini.

Proses ini dimulai dengan memahami konteks organisasi PT JIEP dan isu – isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuannya dan dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai sasaran hasil yang diinginkan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) terintegrasi. Isu ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Ukuran, struktur, dan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan yang saat ini dijalankan;
2. Lokasi/sektor operasi atau antisipasi pengoperasian;
3. Sifat, skala, dan kompleksitas dari aktivitas dan operasi PT JIEP;
4. Model bisnis PT JIEP;
5. Entitas dimana PT JIEP mempunyai kendali dan entitas yang menerapkan kendali terhadap PT JIEP;
6. rekan bisnis PT JIEP;
7. Sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat publik; dan
8. Peraturan perundang – undangan, regulasi kontrak, serta kewajiban dan tugas profesional.
9. 1 Isu dapat termasuk faktor positif dan negatif atau kondisi yang dipertimbangkan.
10. Memahami konteks eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.
11. Memahami konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi.

4) Klausul 5 *Leadership* (kepemimpinan)



Gambar 5. 4 Alur penyusunan pedoman klausul 5

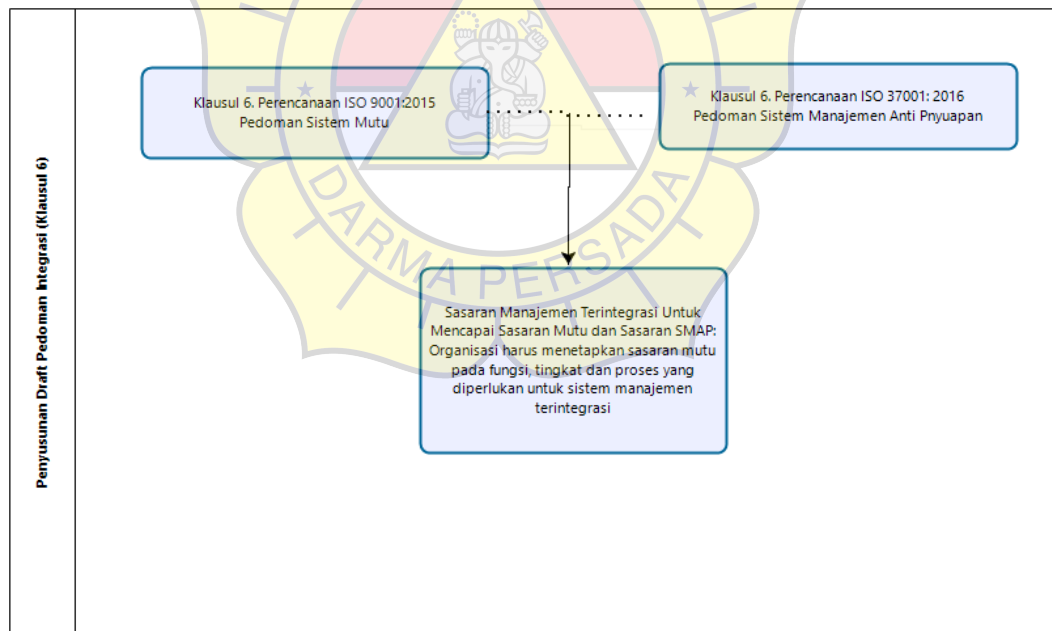
Pada klausul 5 mengenai leadership (kepemimpinan), di Pedoman ISO 9001:2015 (SMM) menyantumkan sub klausul 5.2. Kebijakan mutu halaman 16 dan halaman 31 Klausul 5.3. Peran, tanggung jawab dan wewenang secara organisasional halaman 32. Pada Pedoman ISO 37001:2016 (SMAP) menyantumkan sub Klausul 5.2. Kebijakan Anti Pnyuapan ada pada halaman 13 dan halaman 45, Klausul 5.3. Peran, Tanggung Jawab & Wewenang Organisasi halaman 46 Menambahkan poin baru pada pedoman mengenai klausul 5.3.1. Roles & Responsible, 5.3.2. *Anti Bribery Compliance Function*, 5.3.3. *Delegate Decision Making*. Perubahannya dapat dilihat menjadi sebagai berikut.

Direksi maupun Dewan Komisaris menetapkan, memelihara, dan meninjau Kebijakan Anti Penyuapan sebagai wujud informasi terdokumentasi dari komitmen anti penyuapan dimana Kebijakan Anti Penyuapan mengandung unsur – unsur yang terintegrasi seperti berikut ini :

1. Melarang penyuapan dalam bentuk apapun dan sebesar apapun;
2. Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku di PT JIEP;
3. Kebijakan yang dirancang sesuai dengan tujuan serta berkesinambungan dengan sistem dan prosedurnya;
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan;
5. Termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
6. sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah stratejik;
7. menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu;
8. termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku;
9. termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu.
10. PT JIEP mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan;.
11. PT JIEP berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan;

12. Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan;
13. Seluruh Insan JIEP harus mengerti konsekuensi jika tidak sesuai dengan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
14. Tersedia sebagai informasi terdokumentasi Dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai didalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah;
15. Tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan, jika sesuai.

5) Klausul 6 Perencanaan



Gambar 5. 5 Alur penyusunan pedoman klausul 6

Pada klausul 6 mengenai perencanaan pada ISO 9001:2015 (SMM) ada pada halaman 33 sub klausul Sasaran mutu dan rencana pencapaiannya Dan pada Pedoman ISO 37001:2016 (SMAP) pada halaman 49 menjadi berikut ini :

Sasaran Manajemen Terintegrasi Untuk Mencapai Sasaran Mutu dan Sasaran SMAP: Organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen terintegrasi :

- a. konsisten dengan kebijakan mutu;
- b. terukur;
- c. memperhitungkan persyaratan yang berlaku;
- d. relevan terhadap kesesuaian produk dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan;
- e. dipantau;
- f. dikomunikasikan;
- g. dimuthkirkan seperlunya.
- h. Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi dari sasaran mutu dan sasaran anti penyuapan.
- i. PT JIEP menetapkan sasaran dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada fungsi dan tingkat yang relevan.
- j. Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan disimpan sebagai bagian dari Informasi Terdokumentasi dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- k. Dalam melakukan perencanaan dalam mencapai sasaran Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Anti Penyuapan

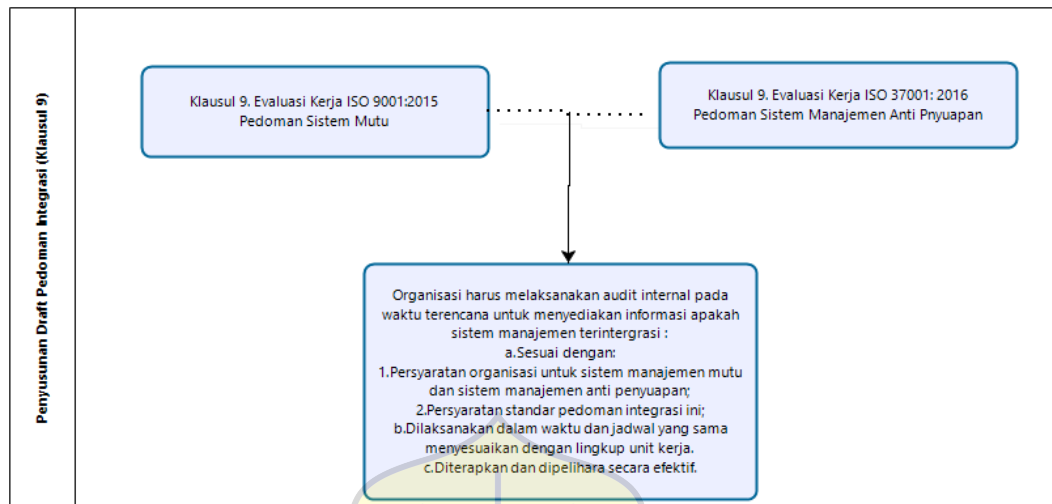
6) Klausul 8 Operasi

Pada klausul 8 mengenai Operasi pada ISO 9001:2015 (SMM) ada pada Perencanaan dan pengendalian operasional halaman 40 Dan pada Pedoman ISO 37001:2016 (SMAP) Klausul 8.1. Perencanaan & Pengendalian Operasi halaman 57, digabungkan menjadi :

Organisasi harus merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi peyediaan produk dan jasa serta untuk menerapkan tindakan sistem terintegrasi dengan:

- a. Menentukan persyaratan bagi produk dan jasa;
- b. Menentukan persyaratan bagi pembeli dan pengelola barang dan jasa agar tidak adanya tindakan penyusunan dan lainnya,
- c. Menetapkan kriteria untuk:
 1. proses;
 2. adanya Uji Kelayakan;
 3. keberterimaan produk dan jasa;
- d. Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk dan jasa;
- e. Menerapkan kendali proses sesuai dengan kriteria;
- f. Menentukan, memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan:
 1. agar ada keyakinan terhadap proses yang telah dilaksanakan seperti yang direncanakan;
 2. untuk memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk dan jasa.

7) Klausul 9 Evaluasi Kerja



Gambar 5. 6 Alur penyusunan pedoman klausul 9

Pada klausul 9 mengenai Evaluasi Kerja pada ISO 9001:2015 (SMM) ada pada Sub klausul 9.1. Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi halaman 49, Sub klausul 9.2. Audit internal halaman 50 Dan pada Pedoman ISO 37001:2016 (SMAP) terdapat pada Sub klausul 9.1. Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi halaman 66, Sub klausul 9.2. Audit internal halaman 66 berubah menjadi berikut ini :

Organisasi harus melaksanakan audit internal pada waktu terencana untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen terintegrasi :

a. Sesuai dengan:

1. Persyaratan organisasi untuk sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuaapan;

2. Persyaratan standar pedoman integrasi ini;
 - b. Dilaksanakan dalam waktu dan jadwal yang sama menyesuaikan dengan lingkup unit kerja.
 - c. Diterapkan dan dipelihara secara efektif.
 - d. Dijadwalkan dengan waktu yang sama.

Pada hasil penggabungan dari pedoman sistem manajemen mutu dan pedoman sistem manajemen anti penyuapan diatas, maka dapat dilakukan finalisasi perancangan draft Pedoman manajemen terintegrasi yang baru.

5.3.1. Rancangan Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi

Hasil dari penelitian ini adalah Pedoman Sistem manajemen yang isinya telah mencakup dua sistem manajemen yang diterapkan sebelumnya oleh perusahaan berdasarkan *requirement* ISO 9001: 2015 dan ISO 37001: 2016. Pada hasil perancangan pedoman yang baru terdapat ketentuan yang memenuhi standar kedua ISO tersebut. Hasil perancangan Pedoman merupakan pedoman yang juga telah di diskusikan dengan pihak perusahaan dimana hal ini menunjukkan bahwa pedoman yang dihasilkan memiliki aktivitas yang dapat di implementasikan oleh pihak perusahaan sehingga dapat dijadikan acuan terutama bagi dokumen-dokumen dan kegiatan turunan lainnya.

Hasil rancangan pedoman sistem manajemen yang terbaru telah sesuai dengan kondisi perusahaan karena didukung dengan rekomendasi pengintegrasian 2 sistem organisasi di PT JIEP yang berpengaruh terhadap fungsi wakil manajemen, pengendali dokumen mutu dan smap, dan bagian audit. Pada pedoman yang dirancang diharapkan dapat menjadim terlaksananya proses sistem manajemen

terintegrasi dengan adanya penentuan dalam setiap kebijakan. Pada Pedoman yang dituangkan dalam penelitian juga telah mempertimbangkan informasi yang diberikan dari proses analisis dan evaluasi serta mempertimbangkan arahan dalam penyempurnaan proses pekerjaan terkait sehingga tidak ada kesenjangan dalam pemindahan informasi yang di atur didalamnya.

